

BIAS GENDER DALAM PROSES PENDIDIKAN ISLAM

Jelli Gustiana¹

Email: jelligustiana77@yahoo.com

Abstract: Education is an activity that is carried out in the community with the goal of humanizing. Formal education is a means for socialization and transfer of values and norms prevailing in society, including the values and norms of gender. There was a lot of gender inequalities in society that arises because there is a gender bias in education including religious education. Based on the search turns gender inequality in education is not because of the substance of religion, but rather the interpretation misunderstood an original source of religion (Islam), thus the need reinterpretasi religious understanding of gender bias is continuous, improve education curriculum that eliminates dichotomous between men and women, and provide higher learning opportunities to women.

Keywords: bias, gender and education

Abstrak: Pendidikan merupakan aktivitas yang khas bagi manusia dalam suatu komunitas masyarakat dengan tujuan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan merupakan sarana formal untuk sosialisasi sekaligus transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai dan norma gender. Terjadi banyak ketidakadilan gender di masyarakat yang diasumsikan muncul karena terdapat bias gender dalam pendidikan termasuk pendidikan agama. Berdasarkan penelusurannya ternyata ketidakadilan gender dalam pendidikan bukan dikarenakan substansi ajaran agama, melainkan adanya penafsiran yang keliru dalam memahami sebuah sumber asli ajaran agama (Islam), dengan demikian perlu reinterpretasi pemahaman agama yang bias gender yang dilakukan secara kontiniu, memperbaiki muatan kurikulum pendidikan yang menghilangkan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, dan memberikan kesempatan belajar yang lebih tinggi kepada perempuan.

Kata Kunci: Bias, gender dan pendidikan

PENDAHULUAN

Banyak laki-laki mengatakan, sungguh tidak mudah menjadi laki-laki karena masyarakat memiliki ekspektasi yang berlebihan terhadapnya. Mereka haruslah sosok kuat, tidak cengeng, dan perkasa. Ketika seorang anak laki-laki diejek, dipukul, dan dilecehkan oleh kawannya yang lebih besar, ia biasanya tidak ingin menunjukkan bahwa ia

sebenarnya sedih dan malu. Sebaliknya, ia ingin nampak percaya diri, gagah, dan tidak memperlihatkan kekhawatiran dan ketidakberdayaannya. Ini menjadi beban yang sangat berat bagi anak laki-laki yang senantiasa bersembunyi di balik topeng maskulinitasnya.

Kenyataannya juga menunjukkan, menjadi perempuan pun tidaklah mudah. Stereotip perempuan yang pasif,

emosional, dan tidak mandiri telah menjadi citra baku yang sulit diubah. Karenanya, jika seorang perempuan mengekspresikan keinginan atau kebutuhannya maka ia akan dianggap egois, tidak rasional dan agresif. Hal ini menjadi beban tersendiri pula bagi perempuan.

Keadaan di atas menunjukkan adanya ketimpangan atau bias gender yang sesungguhnya merugikan baik bagi laki-laki maupun perempuan. membicarakan gender tidak berarti membicarakan hal yang menyangkut perempuan saja. Gender dimaksudkan sebagai pembagian sifat, peran, kedudukan, dan tugas laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan norma, adat kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat.

Ketidakadilan gender atau disebut juga dengan bias gender telah berlangsung dan disosialisasikan melalui proses pendidikan di lingkungan keluarga bahkan dalam sistem pembelajaran di sekolah. Sementara pendidikan merupakan aktivitas yang khas bagi manusia dalam suatu komunitas masyarakat dengan tujuan untuk memanusiaikan manusia,² dan merupakan instrumen yang penting bagi pemberdayaan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang termarginalkan.³

Pendidikan juga merupakan kunci terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat, karena di samping merupakan alat untuk mentransfer

norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan manusia, juga sebagai alat untuk mengkaji dan menyampaikan ide-ide dan nilai baru. Dengan demikian, lembaga pendidikan merupakan sarana formal untuk sosialisasi sekaligus transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai dan norma gender. Nilai dan norma tersebut ditransfer secara lugas maupun secara tersembunyi, baik melalui buku-buku teks yang digunakan maupun pada suasana dan proses pembelajaran.

Terjadi banyak ketidakadilan gender di masyarakat yang diasumsikan muncul karena terdapat bias gender dalam pendidikan termasuk pendidikan agama. Realitas yang ada, dalam pendidikan (agama ataupun umum) masih terdapat banyak hal yang menonjolkan laki-laki berada pada sektor publik sementara perempuan berada pada sektor domestik. Dengan kata lain, bahan ajar bagi siswa belum bernuansa netral gender baik dalam gambar ataupun ilustrasi kalimat yang dipakai dalam penjelasan materi.

Dalam tulisan ini membahas tentang ketidakadilan gender yang terjadi dalam proses pendidikan khususnya pendidikan Islam, yang disistematir pendahuluan, konsep kesetaraan gender, bias gender dalam pendidikan, bentuk-bentuk bias gender dalam pendidikan Islam, dan solusi ketidakadilan gender pendidikan.

PEMBAHASAN

Konsep Kesetaraan Gender

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas hubungan kaum perempuan dan laki-laki adalah membedakan antara konsep sex (jenis kelamin) dan konsep gender.⁴ Pemahaman dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan dan laki-laki. Hal ini disebabkan karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan gender (gender inequalities) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Pemahaman atas konsep gender sangatlah diperlukan mengingat dari konsep ini telah melahirkan suatu bias gender.⁵

Istilah gender digunakan berbeda dengan sex.⁶ Gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara sex digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah sex lebih banyak berkonsentrasi pada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sementara itu, gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial,

budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya.⁷

Perbedaan tersebut melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki bertugas mengurus urusan luar rumah dan perempuan bertugas mengurus urusan dalam rumah yang dikenal sebagai masyarakat pemburu (hunter) dan peramu (gatherer) dalam masyarakat tradisional, sektor publik dan sektor domestik dalam masyarakat modern.⁸ Perbedaan gender (gender differences) pada proses berikutnya melahirkan peran gender (gender role) dan dianggap tidak menimbulkan masalah, maka tak pernah digugat. Akan tetapi yang menjadi masalah dan perlu digugat adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender dan perbedaan gender.⁹ Dari studi yang dilakukan dengan menggunakan analisis gender ternyata banyak ditemukan berbagai manifestasi ketidakadilan, sebagai berikut¹⁰

Pertama, terjadi *marginalisasi* (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Misalnya, guru taman kanak-kanak atau pekerjaan sekretaris dinilai lebih rendah dibanding pekerjaan laki-laki, dan seringkali berpengaruh terhadap perbedaan gaji

antara kedua jenis pekerjaan tersebut.

Kedua, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis seks, yang umumnya pada kaum perempuan.¹¹

Ketiga, pelabelan negative (*stereotype*) terhadap perempuan, dan akibat dari *stereotype* itu terjadi diskriminasi serta ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat banyak sekali *stereotype* yang dilabelkan kepada kaum perempuan yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan dan merugikan kaum perempuan.

Keempat, kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang disebabkan peran gender. Kekerasan di sini mulai dari kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk yang halus contohnya pelecehan seksual dan penciptaan ketergantungan.¹²

Kelima, tugas domestik, tugas utama perempuan adalah pekerjaan rumah tangga, maka banyak perempuan mananggung beban kerja domestik lebih banyak dan tahan lama. Beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat, terlebih bagi kaum perempuan yang juga bekerja di luar rumah. Mereka selain bekerja di luar rumah juga masih harus bertanggung jawab untuk keseluruhan pekerjaan domestik (rumah tangga).

Kesemua manifestasi ketidakadilan tersebut saling terkait dan mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan

secara mantap, lambat laun akhirnya laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya percaya bahwa peran gender itu seolah-olah menjadi kodrat. Lambat laun terciptalah suatu struktur dan sistem ketidakadilan gender yang "diterima" dan sudah tidak lagi dapat dirasakan ada sesuatu yang salah. Persoalan ini bercampur dengan kepentingan kelas, itulah mengapa justru banyak kaum perempuan kelas menengah yang sangat terpelajar sendiri yang ingin mempertahankan sistem dan struktur tersebut.

Bias Gender dalam Pendidikan

Yang dimaksud bias¹³ gender adalah mengunggulkan salah satu jenis kelamin dalam kehidupan sosial atau kebijakan publik. Bias gender dalam pendidikan adalah realitas pendidikan yang mengunggulkan satu jenis kelamin tertentu sehingga menyebabkan ketimpangan gender.¹⁴

Berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, terpresentasi juga dalam dunia pendidikan.¹⁵ Bahkan proses dan institusi pendidikan dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestrikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasi dalam

beberapa dimensi, antara lain:

1. Kurangnya partisipasi (*under-participation*). Dalam hal partisipasi pendidikan, perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama. Dibanding lawan jenisnya, partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Di negara-negara dunia ketiga dimana pendidikan dasar belum diwajibkan, jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga jumlah murid laki-laki.¹⁶
2. Kurangnya keterwakilan (*under-representation*). Partisipasi perempuan dalam pendidikan sebagai tenaga pengajar maupun pimpinan juga menunjukkan kecenderungan disparitas progresif. Jumlah guru perempuan pada jenjang pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah tersebut menunjukkan penurunan drastis.
3. Perlakuan yang tidak adil (*unfair treatment*). Kegiatan pembelajaran dan proses interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan. Para guru kadangkala cenderung berpikir ke arah "*self fulfilling prophecy*" terhadap siswa perempuan karena menganggap perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan yang tinggi.
4. Dimensi akses adalah fasilitas pendidikan yang sulit dicapai atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya tanpa memiliki otoritas untuk memutuskan terhadap produk/hasil maupun metode pendayagunaan sumber daya tersebut. Faktor penyebabnya antara lain: kurang tersedianya sekolah menengah di setiap kecamatan, jarak yang jauh dari tempat tinggal, beban tugas rumah tangga yang banyak dibebankan pada anak. Akumulasi dari faktor-faktor ini membuat banyak anak-anak yang cepat meninggalkan bangku sekolah.
5. Dimensi proses pembelajaran adalah materi pendidikan seperti misalnya yang terdapat dalam contoh-contoh soal dimana semua kepemilikan selalu mengatasnamakan laki-laki. Dalam buku-buku pelajaran misalnya semua jabatan formal dalam buku seperti camat dan direktur digambarkan dijabat oleh laki-laki. Selain itu ilustrasi gambar juga bias gender, yang seolah-olah menggambarkan bahwa tugas wanita adalah sebagai ibu rumah tangga dengan tugas-tugas menjahit, memasak dan mencuci. Faktor penyebabnya *stereotype gender*.
6. Dimensi penguasaan adalah kemampuan yang dimiliki

seseorang untuk memajukan peranannya dalam masyarakat. Faktor penyebabnya pemanfaatan yang minim, peran yang tidak terserap oleh masyarakat dan masih berpegang pada nilai-nilai lama yang tidak tereformasi. Contohnya saja buta huruf yang didominasi oleh kaum perempuan.

7. Dimensi kontrol adalah kemampuan atau otoritas untuk memutuskan menggunakan produk atau hasil, bahkan juga untuk menentukan metode pendaagunaannya, sehingga memiliki kekuatan untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya tersebut. Faktor penyebabnya tidak memiliki otoritas atau kemampuan untuk menggunakan maupun mendayagunakan sumber daya.
8. Dimensi manfaat adalah sesuatu yang baik untuk didapatkan atau diterima oleh seseorang dari proses penggunaan atau mendayagunakan sumber daya. Faktor penyebabnya dimensi akses, kontrol, maupun partisipasi yang didapatkan kecil.

Bentuk-Bentuk Bias Gender dalam Pendidikan Islam

Bentuk-bentuk bias gender dalam pendidikan Islam semakin jelas terlihat dalam pengelompokan gender ke dalam jurusan, bidang kejuruan atau bidang-bidang keahlian yang berbeda-beda menurut jenis kelamin. Gejala ini

berdampak buruk berupa kompetisi yang kurang sehat dalam hubungan antar gender yang mengakibatkan seluruh potensi peserta didik tidak akan dikembangkan secara optimal.

Menurut Musda Mulia, pendidikan Islam khususnya pendidikan di pesantren, dikenal dengan pendidikan yang menganut sistem otoriter. Guru atau ustadz umumnya diperlakukan sebagai sosok yang harus dihormati sehingga tidak pantas dikritik. Fatalnya, mengajukan pertanyaan sering dimaknai sebagai memberi kritik. Hubungan antar guru dan peserta didik selalu berjarak seperti hubungan atasan dan bawahan.¹⁷ Lebih parah lagi pengkultusan kepada kiai atau guru mentradisi pada sebagian institusi pendidikan yang berbasis pesantren seperti seorang santri meminum air sisa sang kiai untuk mendapatkan berkah dan ilmunya seperti sang guru. Padahal kalau malas belajar maka tidak mungkin akan menyerupai gurunya.

Selain yang disebutkan di atas, maka bentuk lain dari bias gender dalam pendidikan meliputi:

1. Kaum laki-laki lebih dominan dalam memilih jurusan dan mempelajari kemampuan atau ketrampilan pada bidang kejuruan teknologi dan industri sehingga dengan jenis ketrampilan kejuruan yang dipelajarinya itu, laki-laki seolah-olah secara khusus dipersiapkan untuk menjadi pemain utama dalam

- dunia produksi. Sementara itu, perempuan lebih dipersiapkan untuk melaksanakan peran pembantu, misalnya ketatausahaan dan teknologi kerumahtangga.
2. Jumlah siswa perempuan yang memilih jurusan IPA atau matematik di SMU lebih kecil proporsinya sehingga mereka lebih sulit untuk memasuki berbagai jurusan keahlian di perguruan tinggi, misalnya dalam berbagai bidang teknologi dan ilmu-ilmu eksakta lainnya. Pada kedua jenis jurusan keahlian itu, proporsi mahasiswi hanya mencapai 19,8%. Di lain pihak mahasiswi lebih dominan dalam jurusan-jurusan keahlian terapan bidang manajemen (57,7%), pelayanan jasa dan transportasi (64,2%), bahasa dan sastra (58,6%) serta psikologi (59,9%).¹⁸
 3. Pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) perempuan lebih dominan pada program diploma yang menyiapkan guru SLTP ke bawah (68,2%) dan program sarjana yang menyiapkan guru sekolah menengah (55,7%). Gejala ini menunjukkan, perempuan lebih banyak yang dipersiapkan untuk menjadi guru pendidikan dasar dan menengah. Keadaan ini juga ditunjukkan dengan jumlah seluruh guru perempuan dari TK sampai SMU, proporsi perempuan lebih besar (50,8%) dari pada jumlah guru laki-laki (49,2%). Sebaliknya tenaga dosen didominasi oleh laki-laki dengan proporsi 70% pada berbagai tingkat jabatan dosen di PT, dan semakin tinggi jabatan dosen semakin kecil proporsi dosen perempuan. Demikian juga untuk jabatan struktural masih didominasi kaum laki-laki, walaupun ada jumlahnya masih sedikit.¹⁹
 4. Kesenjangan gender menurut jurusan, bidang kejuruan, dan program keahlian dalam pendidikan ini tercermin pula dalam proporsi pegawai negeri sipil (PNS), PNS perempuan hanya menempati proporsi 35,4%, dan semakin tinggi golongan jabatan semakin kecil proporsi perempuannya. Hampir semua keahlian PNS dipegang oleh laki-laki kecuali keahlian di beberapa bidang seperti farmasi (57,7%), biologi (47,9%), bahasa dan sastra (45%), dan psikologi (61,1%).²⁰
- Dalam konteks ini dipahami bahwa data yang dikemukakan oleh Ace membuktikan masih terjadinya bias gender dalam pendidikan, karena untuk mendapatkan tingkat posisi sebagai pengambil keputusan sangat ditentukan oleh pendidikan seseorang dalam promosi jabatan. Dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang (perempuan), maka jabatan yang dipegang oleh perempuan semakin banyak, tetapi

kenyataan empirik menunjukkan belum signifikan antara tingkat pendidikan dengan jabatan yang dipegang oleh perempuan.

Bila dihubungkan dengan agama Islam, maka Islam sebagai suatu ajaran dan doktrin keagamaan, diyakini oleh pemeluknya sebagai satu-satunya pemegang otoritas dalam pemberian garansi keselamatan setelah kehidupan manusia usai atau di akhirat kelak. Islam juga dijalankan tidak hanya dalam urusan peribadatan melainkan dalam urusan interaksi kemanusiaan yang pada akhirnya merambah wilayah sosial, budaya dan seluruh sendi kehidupan masyarakat lainnya, begitu juga dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, pada aspek pendidikan, Islam juga ikut mempengaruhi dan memberi panduan berupa norma yang diamalkan oleh pemeluknya sehari-hari. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah pendidikan Islam ikut melestarikan ketidakadilan gender tersebut. Kebanyakan konsep yang diutarakan dalam menyebutkan tujuan pendidikan Islam adalah memperkokoh harmonisasi.

Dalam rumusan tersebut, kata-kata "harmoni", dapat disejajarkan dengan 'penjagaan stabilitas'. Dalam teori sosial, kata-kata ini dianggap sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan dalam aplikasi sosial kedua kata itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Harmoni dan stabilitas dalam

kehidupan adalah pengaruh dari teori fungsionalis struktural yang dikembangkan Talcot Parsons yang menginginkan adanya keseimbangan kehidupan masyarakat. Meskipun konflik dan masalah suatu saat bisa muncul, tetap dalam batas kewajaran dan bukan ancaman yang akan merusak sistem sosial. Masyarakat digiring pada pemahaman pada apa saja yang terjadi dalam kehidupan sudah diatur dalam struktur-struktur tertentu dengan fungsi masing-masing.

Keseimbangan hanya akan terwujud apabila ada pembagian-pembagian tugas yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sosial tertentu. Dalam analisa lebih lanjut, harmoni dan stabilitas mengarah pada kekuasaan dan status sosial. Terutama kekuasaan yang ada dalam wilayah gender. Menurut Hilary M. Lips, dalam bukunya *Sex and Gender: An Introduction*, menjelaskan bahwa relasi gender didasari oleh relasi kuasa dan status. Dalam kedua relasi ini, laki-laki memiliki kekuasaan dan status yang lebih besar daripada perempuan.²¹

Di dalam proses pendidikan Islam ini bisa terlihat adanya perbedaan ruang antara laki-laki dan perempuan, ataupun jika dikumpulkan di dalam satu ruangan pun, pasti kebanyakan murid laki-laki lah yang berada di depan, sedangkan perempuan menempati tempat duduk di belakang murid laki-laki. Di sini terlihat bahwa

pola kekuasaan dan status berpengaruh secara universal di dalam masyarakat, bahkan di dalam dunia pendidikan yang nota bene seharusnya menjadi media transformasi pengetahuan dan perempuan kebanyakan sudah minder terlebih dahulu karena tidak diberi kesempatan lebih awal, sehingga pada proses hafalannya mereka sering tidak memperoleh hasil sebagaimana siswa laki-laki. Meskipun kalau diberi kesempatan yang seimbang, siswa perempuan bahkan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih cemerlang. Seperti metode Enquiry dan Discovery, yang menekankan pada minat dan bakat dalam proses pendidikan Islam dapat menimbulkan kontroversi karena dapat memicu ketidakadilan gender. Sebab, bila dicermati, metode itu mempunyai potensi untuk melakukan pembedaan secara khusus terhadap minat dan bakat siswa laki-laki dan perempuan.

Pada metode *uswatun hasanah*, bila guru tidak peka dalam memberikan suri tauladan, maka akan menjebak murid untuk menerima perilaku guru tanpa ada penyaringan dari murid. Termasuk perilaku yang sangat dapat menimbulkan bias gender adalah guru perempuan yang menerangkan secara lemah lembut. Perilaku lemah lembut guru perempuan di sini, bisa saja tidak dipahami sebagai proses membimbing melainkan karena memang sudah menjadi kodrat wanita untuk berperilaku lemah lembut. Sehingga tak

jarang kebanyakan murid laki-laki suka diajar oleh guru perempuan.

Pemberian hukuman pada siswa juga bisa jadi menimbulkan bias apabila dalam memberi hadiah dan memberi hukuman ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Lalu pada metode yang berdasarkan pada *conditioning* bisa menjadikan adanya bias gender sebab alat peraga yang dipergunakan dalam kelas biasanya rawan untuk membedakan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Misalnya para siswi biasanya disuruh menyapu atau ditampilkan untuk memperagakan bagaimana menyapu lantai, sedangkan para siswa laki-laki disuruh melakukan hal-hal yang menunjukkan keperkasaan, seperti mencangkul rumput dan sebagainya.

Tidak hanya di dalam tujuan dan metode, materi dalam proses pendidikan Islam juga mengalami bias. Materi dalam proses pendidikan Islam harus didudukkan sebagai bahan kurikulum dalam pendidikan Islam yang bersumber dari teks agama dan pemahaman terhadap teks tersebut. Teks sebagai sumber materi dapat diambil melalui al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber utama. Sedangkan pemahaman terhadap teks dapat dilihat dalam buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Buku-buku ini merupakan buah karya para pemikir Islam, biasanya disebut dengan kitab kuning.

Al-Qur'an, sebagai sumber paling utama teks dalam Islam menurut Nasaruddin Umar sebenarnya sangat sensitif gender, apabila melihat tentang substansi kejadian manusia, bahwa awal pembentukan manusia dalam derajat manusia sama. Lalu dari segi pengabdian/derajat dalam Al Qur'an diukur bukan dengan jenis kelamin melainkan melalui tingkat ketaqwaan manusia kepada Allah. Dan dari sisi kemanusiaan, Al Qur'an memposisikan manusia dalam bentuk dan derajat yang paling mulia. Dari kajian itu dapat disimpulkan bahwa Islam sejak awal berusaha menghapus ketidakadilan gender.²²

Namun persoalan muncul ketika interpretasi terhadap teks justru menjauhkan dari realitas ini. Bias gender dalam materi pendidikan Islam biasanya tampil melalui pemahaman terhadap teks awal (al-Qur'an). Sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan atau ulasan materi yang ada pada kitab kuning. Salah satu contoh konsep hukum kekeluargaan (*al ahwal as syahsyiyah*), seperti fiqh perkawinan (munakahat), yang memberikan hak-hak suami jauh lebih besar dibanding hak-hak perempuan, fiqh waris (al mawaris) yang memberikan porsi lebih besar kepada laki-laki dan fiqh politik (al siyasah) yang membatasi hak-hak perempuan untuk berkarir di dunia politik. Karya-karya ulama fiqh dinilai oleh para feminis sudah tidak relevan lagi, karena masyarakat sedemikian

jauh telah berubah.²³ Kerana itu terlihat jelas bahwa kebanyakan dari materi pendidikan Islam adalah materi yang mengandung banyak unsur bias gendernya.

Ini disebabkan karena penafsiran-penafsiran oleh para cendekiawan Islam masa awal terhadap teks-teks Al Qur'an masih banyak yang mengandung bias gender dan karya-karya mereka pada masa selanjutnya ternyata masih tetap dijadikan referensi utama dalam membuat materi pendidikan Islam tanpa mengadakan revisi ulang sesuatu dengan perkembangan zaman. Karena itu harus ada perubahan materi pendidikan Islam yang sama sekali tidak bias gender, dan tidak terpaku pada karya-karya klasik para cendekia terdahulu yang masih bias gender.

Ketidakadilan gender dalam pendidikan Islam bukan dikarenakan substansi ajaran Islam, melainkan adanya penafsiran yang keliru dalam memahami sebuah sumber asli ajaran Islam. Islam adalah ajaran agama yang menggunakan prinsip-prinsip universal, seperti keadilan dan persaudaraan. Pada masa permulaan Islam (*the proto Islamic law*) kebebasan perempuan mulai dapat terlihat. Nabi Muhammad pada masa itu sudah mendemonstrasikan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam aktivitas sosial, mulai kewirausahaan, politik, sampai peperangan.²⁴ Namun setelah wafatnya

Nabi, semua itu sirna.

Proses perjuangan Nabi yang mengangkat martabat kaum perempuan Arab setelah sekian lama ditindas oleh kaum laki-laki tidak dilanjutkan pada masa penguasa Islam setelah Nabi. Melihat yang demikian, pendidikan Islam mempunyai tugas untuk mengembalikan Islam pada ajaran universal yang menitikberatkan keadilan, persamaan, dan kesetaraan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi pada awal berkembangnya Islam.

Faktor Penyebab Bias Gender dalam Pendidikan Islam

Faktor-faktor penyebab bias gender dapat dikategorisasikan ke dalam tiga aspek, yaitu *partisipasi, akses, dan kontrol*. Namun, tidak semua aspek yang disebutkan dapat dipaksakan untuk menjelaskan masing-masing bias gender yang terjadi secara empiris dalam bidang pendidikan. Dengan kata lain faktor-faktor penyebab bias gender akan sangat tergantung dari situasinya masing-masing.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab bias gender berkaitan dengan perolehan kesempatan belajar pada setiap jenjang pendidikan adalah:

1. Perbedaan angkatan partisipasi pendidikan pada tingkat SD/ Ibtidaiyah sudah mencapai titik optimal yang tidak mungkin diatasi dengan kebijakan pendidikan, sehingga perbedaan itu menjadi

semakin sulit ditekan ketitik yang lebih rendah lagi. Kesenjangan ini lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor struktur karena fasilitas pendidikan SD sudah tersebar relatif merata. Faktor-faktor struktural itu diantaranya adalah nilai-nilai sosial budaya, dan ekonomi keluarga yang lebih menganggap pendidikan untuk anak laki-laki lebih penting dibandingkan dengan perempuan. Faktor ini berlaku terutama di daerah-daerah terpencil yang jarang penduduknya serta pada keluarga-keluarga berpendidikan rendah yang mendahulukan pendidikan untuk anak laki-laki.

2. Pada tingkat SLTP/Tsanawiyah dan SMU/Madrasah Aliyah perbedaan angka partisipasi menurut gender lebih banyak terjadi pada daerah-daerah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan, terutama di daerah-daerah pedesaan dan luar Jawa. Faktor penyebab bias gender pada tingkat SLTP ke atas relatif lebih kecil dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial budaya dan ekonomi keluarga karena siswa dan mahasiswa yang datang dari keluarga sosial ekonomi tinggi sudah lebih besar proporsinya. Dengan demikian, pengadaan dan distribusi sumber-sumber pendidikan SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi masih menjadi faktor penting untuk

mengurangi bias gender dalam pendidikan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bias gender yang berhubungan dengan akses dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pendidikan sangat rendah karena akses perempuan juga masih dirasakan rendah dalam menempati jabatan-jabatan birokrasi pemegang kebijakan. Proporsi kepada sekolah perempuan secara konsisten masih kecil dibandingkan dengan laki-laki pada setiap jenjang pendidikan. Perempuan pemegang jabatan struktural, dari tingkatan strategis sampai operasional jauh lebih rendah dari pada lawan jenisnya. Oleh karena itu, banyak kebijakan pendidikan kurang sensitif gender, yang akan berdampak luas terhadap berbagai dimensi bias gender dalam bidang pendidikan.
2. Laki-laki lebih dominan dalam mempengaruhi isi kurikulum sehingga proses pembelajaran cenderung bias laki-laki (*male bias*). Fenomena ini dapat diamati dari buku-buku pelajaran yang sebagian besar penulisnya adalah laki-laki. Penulis buku laki-laki sangat dominan.
3. Isi buku pelajaran yang membahas status perempuan dalam masyarakat

akan banyak memberikan pengaruh terhadap kesenjangan gender dalam proses pendidikan. Muatan dari sebagian buku-buku pelajaran (khususnya IPS, PPKN, Pendidikan Jasmani, Bahasa dan Sastra Indonesia, Kesenian dan sejenisnya) yang berhasil diamati cenderung kurang berwawasan gender khususnya berkaitan dengan konsep keluarga atau peran perempuan dalam keluarga yang telah lama dipengaruhi oleh cara berpikir tradisional, bahwa laki-laki adalah pemegang fungsi produksi sedangkan perempuan memegang fungsi reproduksi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab bias gender dalam bidang kurangnya kontrol kebijakan pendidikan adalah:

- a. Faktor kesenjangan antar gender dalam bidang pendidikan jauh lebih dominan laki-laki. Khususnya dalam lembaga birokrasi di lingkungan pendidikan sebagai pemegang kekuasaan atau kebijaksanaan, maupun dalam jabatan-jabatan akademis kependidikan sebagai pemegang kendali pemikiran yang banyak mempengaruhi kebijakan pendidikan. Keadaan ini akan semakin bertambah parah jika para pemikir atau pemegang kebijaksanaan pendidikan tersebut tidak memiliki sensitivitas gender.

- b. Khusus pada kebijaksanaan pendidikan, khususnya menyangkut sistem seleksi dalam pendidikan. Kontrol dalam penerimaan karyawan terutama disektor swasta sangat dirasakan bias gender. Kenyataan menunjukkan bahwa jika suami istri berada dalam salah satu perusahaan, misalnya Bank, baik milik pemerintah maupun swasta, maka salah satunya harus memilih untuk keluar, dan biasanya perempuanlah yang memilih keluar dari pekerjaan. Ini bagian dari faktor-faktor bias gender dalam bidang pendidikan.
- c. Faktor struktural, yakni yang menyangkut nilai, sikap, pandangan, dan perilaku masyarakat yang secara dominan mempengaruhi keputusan keluarga untuk memilih jurusan-jurusan yang lebih dianggap cocok untuk perempuan, seperti pekerjaan perawat, kesehatan, teknologi kerumah-tanggaaan, psikologi, guru sekolah dan sejenisnya. Hal ini terjadi karena perempuan dianggap hanya memilih fungsi-fungsi produksi (*reproductivefunction*). Laki-laki dianggap lebih berperan sebagai fungsi penopang ekonomi keluarga (*productivefunction*) sehingga harus lebih banyak memilih keahlian-keahlian ilmu teknologi dan industri.
- d. Pendidikan Islam yang konstruktif merupakan salah satu pendekatan pendidikan melalui pembelajaran

induktif, yang berarti mengangkat nilai-nilai faktual empirik. Pendidikan reseptif yang hanya memperkuat hapalan, apabila hapalan itu hilang maka subyek didik tidak akan punya apa-apa lagi, maka diperlukan pendidikan yang demokratis yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, menyampaikan opini, dan mengeskpresikan kemampuan nalar, maka akan melahirkan komunitas intelektual yang cendekiawan.

Faktor lain yang turut mempengaruhi bias gender dalam pendidikan adalah muncul persaingan dengan teknologi, yang menggantikan peranan pekerja perempuan dengan mesin. Dampaknya, lagi-lagi perempuan menjadi korban teknologi khususnya perempuan yang memiliki tingkat pendidikan rendah ditambah pula dengan kemampuan ekonomi yang masih lemah.

Penyempurnaan bahan-bahan pendidikan harus diusahakan dengan jalan menggunakan perspektif keadilan dan kesetaraan gender. Dengan melakukan revisi terhadap buku-buku pelajaran dan bahan materilainnya yang isinya masih sangat bias nilai-nilai patriaki dan sangat bias gender, seperti dalam buku bahasa Indonesia ditingkat pendidikan sekolah dasar: "Bapak pergi ke kantor", "Ibu sedang memasak di

dapur". Contoh kalimat ini memberikan indikasi terjadinya subordinasi dalam penyusunan buku pelajaran, kasus kecil ini memberikan dampak terhadap kerangka berpikir subyek didik, sehingga pada akhirnya semua isi buku pelajaran sarat dengan muatan nilai-nilai kesetaraan dan kemanusiaan yang menempatkan manusia laki-laki dan perempuan dalam posisi sentral sebagai subyek pendidikan.

Solusi Ketidakadilan Gender dalam Proses Pendidikan

Upaya untuk mengatasi ketidakadilan gender dalam pendidikan yang dapat dilakukan sebagai berikut²⁵:

1. Reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang bias gender dilakukan secara kontinu (sudut pandang Islam)
2. Muatan kurikulum nasional yang menghilangkan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, demikian pula kurikulum lokal dengan berbasis kesetaraan, keadilan dan keseimbangan. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan dan tipologi daerah yang dimulai dari tingkat pendidikan Taman Kanak-Kanak sampai ke tingkat Perguruan Tinggi.
3. Pemberdayaan kaum perempuan di sektor pendidikan informal seperti pemberian fasilitas belajar mulai di tingkat kelurahan sampai kepada

tingkat kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Di antara contoh langkah kongkrit yang bisa diambil:

- a. Kemendiknas, Kemenag dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) mengkoordinasikan kebijakan dan strategi yang terfokus pada penghapusan disparitas rasio gender untuk indikator pendidikan pada semua jenjang pendidikan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, serta memperkuat pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua tingkatan di bidang pendidikan.
- b. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan/LPTK perlu mengkaji kurikulum pelatihan guru untuk memperbaiki penyusunan materi dan keterampilan mengajar sehingga responsif gender.
- c. Kemendiknas dan Kemenag mengkaji dan meningkatkan penyediaan buku teks pelajaran yang peka gender pada semua tingkat pendidikan, termasuk teks, gambar dan akses yang sama terhadap semua kegiatan pendidikan (termasuk pendidikan Islam).
- d. Kemendiknas dan Kemenag merumuskan kebijakan yang jelas, yang mengatur penempatan laki-laki dan perempuan yang memenuhi kualifikasi di semua kegiatan pendidikan (termasuk pendidikan

Islam), terutama dalam posisi kepemimpinan, manajemen, dan akademik di semua tingkatan pendidikan (sistem sejenis sudah terlaksana di lapangan dengan adanya perwakilan dalam partai politik dan parlemen).

KESIMPULAN

Ketidakadilan gender dalam pendidikan Islam bukan dikarenakan substansi ajaran Islam, melainkan adanya penafsiran yang keliru dalam memahami sebuah sumber asli ajaran Islam. Islam adalah ajaran agama yang menggunakan prinsip-prinsip universal, seperti keadilan dan persaudaraan.

Guna mengatasi ketidakadilan gender dalam pendidikan yang dapat dilakukan reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits yang bias gender dilakukan secara kontinu, muatan kurikulum pendidikan yang menghilangkan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, dan memberikan kesempatan belajar yang lebih tinggi kepada perempuan, memacu peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan melalui pemberdayaan potensi perempuan secara optimal.

Pada akhirnya kesetaraan gender dalam proses pembelajaran memerlukan keterlibatan seluruh pihak, penulis buku, pengelola pendidikan, pelaksana pendidikan, peneliti bidang pendidikan, Kemendiknas, Kemenag

dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) sebagai pengambil kebijakan di bidang pendidikan.

Endnotes

- ¹ Jelli Gustiana, S. Pd. adalah guru SMA 1 Pakning - Bengkalis. Alumni UNP tahun 2001
- ² Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), h. 33.
- ³ Rr. Suhartini, "Dimensi Gender dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Rawan Longsor", dalam *Model-model*
- ⁴ Mengingat istilah gender masih sangat baru dipergunakan dalam blantika perbenda-haraan kata di Indonesia, maka kata tersebut tidak dijumpai dalam kamus-kamus bahasa Indonesia. Namun, kata ini terus melakukan proses asimilasi dengan Bahasa Indonesia Pengaruh kuat dari sosialisasi dalam masyarakat maka kata tersebut tidak lagi ditulis dengan huruf italic karena sudah seakan-akan dianggap bagian dari bahasa Indonesia, demikian juga dalam penulisan sebagian telah menggunakan kata gender menjadi jender. Peter Salim, *Advance English-Indonesia Dictionary*, edisi ketiga (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 384.
- ⁵ Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 4.
- ⁶ Istilah gender selalu dirancukan dengan istilah jenis kelamin. Dan lebih rancu lagi ketika berbicara persoalan gender yang terbayang adalah jenis kelamin perempuan atau disamakan arti gender dengan persoalan perempuan. Ini adalah pemahaman yang keliru, karena gender bukan menyangkut jenis kelamin perempuan melainkan juga jenis kelamin laki-laki. Jadi sex secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Lebih tegas jenis kelamin (sex) adalah perbedaan biologis hormonal dan patologis antara perempuan dan laki-laki. Misalnya laki-laki memiliki penis, testis, dan sperma, sedangkan perempuan mempunyai vagina, payudara, ovum dan rahim. H.T. Wilson, *Sex and Gender, Aking Cultural Sense of Civilization*, (New York: Kobenhavn, E.J. Brill, 1989), h. 2
- ⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 35.
- ⁸ *Ibid.*, h. 302-302
- ⁹ Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Yurisprudensi*

- Emansipatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2003) h. 47
- ¹⁰ Jumni Nelli, *Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam: Perspektif Analisis Gender*, dalam *Jurnal Hukum dan HAM UIN Suska Riau*, Vol. 6 No.2. 2009
- ¹¹ Dalam rumah tangga, masyarakat maupun Negara, banyak kebijakan dibuat tanpa "menganggap penting" kaum perempuan. Misalnya anggapan, karena perempuan nantinya akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi, adalah bentuk subordinasi yang dimaksudkan. Selama beberapa abad atas alasan agama, kaum perempuan tidak boleh memimpin apapun, termasuk masalah keduniawian, tidak dipercaya memberi kesaksian, bahkan tidak mendapatkan warisan. Munculnya penafsiran agama yang mengakibatkan subordinasi dan marginalisasi kaum perempuan itulah yang dipersoalkan. *Ibid.*
- ¹² Banyak sekali kekerasan yang terjadi pada perempuan yang ditimbulkan karena adanya stereotype gender. Bahwa karena perbedaan gender dan sosialisasi gender yang amat lama, sehingga mengakibatkan kaum perempuan secara fisik lemah dan kaum laki-laki umumnya lebih kuat, maka hal itu tidak menimbulkan masalah sepanjang anggapan lemahnya perempuan tersebut mendorong laki-laki boleh dan bisa seenaknya memukul dan memperkosa perempuan. Banyak terjadi pemerkosaan justru bukan karena unsure kecantikan, namun kekuasaan dan karena stereotype gender yang dilabelkan kepada kaum perempuan. *Ibid.*
- ¹³ Pengertian bias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: simpangan atau belokan arah dari garis tempuhan yang menembus benda bening yang lain (seperti cahaya yang menembus kaca, bayangan yang berada di air. Selanjutnya kata bias adalah semacam prasangka yakni pendapat yang terbentuk sebelum adanya alasan untuk itu, dalam penelitian ilmiah bias dapat menyelinap ke dalam pengamatan atau penafsiran data eksperimen. Bias ini dapat mengakibatkan kurangnya validitas dan nilai ilmiah dari hasil yang di peroleh. Dari pengertian bias apabila dihubungkan dengan gender dan pendidikan akan memberikan pemahaman bahwa dalam pendidikan terjadi penyimpangan atau ketimpangan terhadap jenis kelamin perempuan. Ketimpangan yang terjadi terutama untuk memberikan kesempatan mendapatkan pendidikan kepada perempuan, Isi materi pelajaran terutama di tingkat pendidikan dasar ditemukan bias gender. Karena tingkat pendidikan perempuan masih rendah maka, untuk pengambilan keputusan di bidang pendidikan terutama perumusan kurikulum, pengambil kebijakan, dan kepala sekolah secara umum masih dipegang oleh laki-laki, kecuali di tingkat taman kanak-kanak yang didominasi oleh perempuan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga Ketua Sub Pokja Studi Bahan Ajar Responsif Gender, Dr. Yulfita Raharjo membuktikan bahwa buku-buku pelajaran sarat dengan nuansa bias gender lebih dari 50 persen, meskipun telah di lakukan perbaikan, namun masih ditemukan bias gender dalam buku ajar. Lihat <http://www.suarapembaharuan.com/News/2003/02/11/Kesra/kes02.htm>,
- ¹⁴ Hanun Asrohah, *Sosiologi Pendidikan*, (Surabaya: Kopertais Press, 2008), cet. 1, h. 178
- ¹⁵ Sebagai bukti bahwa pemegang kebijakan dalam bidang pendidikan lebih di dominasi laki-laki dibandingkan perempuan dapat dilihat pada perbandingan dari setiap 100 guru SD, 54 orang adalah perempuan dan dari 100 guru sekolah menengah, 38 orang diantaranya adalah perempuan. Sementara itu tenaga dosen lebih dominan laki-laki, dari 100 dosen hanya 29 orang adalah perempuan.¹⁶ Kepemimpinan dalam pendidikan juga lebih didominasi laki-laki dibandingkan perempuan. Musdah Mulia, *Menggagas Kurikulum Yang berperspektif Gender*, (Jakarta : Jurnal Inovasi, Vol VI/ No .01/ 2003), h. 22
- ¹⁷ Amasari (Member of PSG LAIN), *Laporan Penelitian Pendidikan Berjurutuan Gender*, (Banjannasin: IAIN Antasari, 2005), h. 31
- ¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, cet. I (Bandung: Mizan, 2004), h. 118.
- ¹⁹ Ace Suryadi dan Ecep Idris, *Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*, cet. I (Bandung: Genesindo, 2004), h. 157.
- ²⁰ *Ibid.*, h. 128.
- ²¹ *Ibid.*
- ²² Hilary M. Lips, *Sex and Gender: An Introduction*, (California: Mayfield Publishing Company, 2001) h. 11-17
- ²³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, h. 295
- ²⁴ *Ibid.*
- ²⁵ *Ibid.*, h. 288
- ²⁶ *Ibid.*, h. 36

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Irwan, 1997, *Sangkan Paran gender*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Abdullah, Irwan, 2001, *Seks, Gender dan*

- Reproduksi Kekuasaan, Yogyakarta: Tarawang Press.
- Amasari (Member of PSG LAIN), *Laporan Penelitian Pendidikan Berujatuasan Gender*, Banjannasin: IAIN Antasari, 2005
- Asrohah, Hanun, *Sosiologi Pendidikan*, Surabaya: Kopertais Press, 2008, cet. 1
- Arifin, M, 1993, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Brannon, Linda, 1999. *Gender: Psychological Persective*, Boston: Allyn and Bacon.
- Daradjat, Zakiyah dkk, 2000, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Darwin, Muhajir, Tukiran, 2001, *Menggugat budaya patriarkhi*, Yogyakarta: Penerbit PPK Universitas Gadjah Mada dan Ford Foundation.
- Dzuhayatin, Siti ruhaini, 1996, *Membincang Feminisme*, Surabaya: Penerbit Risalah Gusti.
- Echols, John M, 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Fakih, Mansour, 1998, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), 2001, *Wajah Baru Relasi Suami Istri; Tela'ah Kitab Uqud Al Lujjayn*, Yogyakarta: LkiS.
- Huda, Hizbullah, 2000, *Feodalisme Pendidikan*, Majalah Edukasi Edisi 31/Juni.
- Ilyas, Hamim, 2002, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Lips, Hilary M., 2001, *Sex and Gender: An Introduction*, california: Mayfield Publishing company.
- Megawangi, Ratna, 1999, *Membiarkan Berbeda*, Bandung: Penerbit Mizan.
- Mosse, Julia Cleves, , 1996, *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan RIFKA ANNISA.
- Muhammad, Husein, 2001, *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta: LKiS
- Mulkhan, Munir, 2002, *Nalar Spiritual Pendidikan*, Yogyakarta: Tiara wacana.
- Nelli, Jumni. *Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam: Perspektif*

- Analisis Gender, dalam Jurnal Hukum dan HAM UIN Suska Riau, Vol. 6 No.2. 2009*
- Sindunata, 2000, *Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syuqqah, Abu, 1996, *Jati Diri Wanita Menurut Islam*, Bandung: Penerbit Al-bayan dan Mizan.
- Stewart, Lea P., et all, 2003, *Communication and Gender*, Boston: Allyn and Bacon.
- Suhartini, *"Dimensi Gender dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Rawan Longsor"*, dalam *Model-model*
- Tafsir, Ahmad, 1994, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Rosdakarya.
- Umar Nasaruddin, 2001, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina.
- Wolf, Naomi, 1999, *Geger Gender*, Yogyakarta: Pustaka Semesta Press.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, 1996, *Membincang Feminisme*, Surabaya: Risalah Gusti